

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGAWASAN PENGUJIAN KELAIKAN OPLET  
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMAD ROBI DEPALA**  
**NIM. 11375103066**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGAWASAN PENGUJIAN KELAIKAN OPLET  
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Skripsi pada  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**MUHAMAD ROBI DEPALA**  
**NIM. 11375103066**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMAD ROBI DEPALA  
 NIM : 11375103066  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 JUDUL : ANALISIS PENGAWASAN PENGUJIAN OPLET DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI**

Pembimbing

**DEVI DESWIMAR, S.Sos, M.Si**  
**NIP.130411027**

**MENGETAHUI**

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan

Administrasi Negara



**Dr. Drs. H. MUH. SAID. HM, M.Ag, MM**  
**NIP.196205121989031003**

**DR. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si**  
**NIP.197901012007101003**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMAD ROBI DEPALA

NIM : 113103066

JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGAWASAN PENGUJIAN  
KELAIKAN OPLET DI DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEKANBARU

TANGGAL UJIAN :

**PANITIA PENGUJI  
KETUA PENGUJI**



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM**  
**NIP: 19620512 198903 1 003**

**PENGUJI I**

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**  
**NIP: 19790911 201101 1 003**

**PENGUJI II**

**Ikhwani Ratna, SE. M.Si**  
**NIP: 19830827 201101 2014**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGAWASAN PENGUJIAN KELAIKAN OPLET DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

*Oleh : Muhamad robi depala*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pengujian kelaikan yang beroperasi di Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengujian kelaikan oplet. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala unit pelaksana teknis daerah, Pegawai Bidang pengujian kendaraan, dan supir oplet. Berdasarkan penelitian ini yang menjadi indikator penelitian adalah standar kelaikan dalam artian melakukan pengujian berkala hasil penelitian ini bahwa penetapan standar sudah di tetapkan namun dalam penerapan nya masih kurang, kemudian indikator selanjutnya monitoring ukuran kelaikan, hasil penelitian ini bahwa monitoring ukuran kelaikan masih belum terlaksana dengan baik, indikator selanjutnya adalah menbandingkan hasil aktual dengan standar kelaikan dalam artian melakukan pengawasan serta melihat hasil di lapangan, hasil penelitian ini adalah belum terlaksananya pengawasan dengan optimal, dan indikator terakhir adalah tindakan perbaikan dalam artian pemberian sangsi, hasil penelitian ini adalah belum terlaksana dengan baik. Dengan hasil bahwa kurang terlaksananya pengawasan terhadap kelaikan oplet oleh Dinas Perhubungan. Dari hasil penelitian juga diketahui yang menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelaikan oplet adalah kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, keterbatasan personil dalam pengawasan, dalam melakukan razia harus didampingi pihak kepolisian, kurang tegasnya penerapan sangsi kepada pelanggar dan kurangnya kesadaran pemilik maupun supir tentang standar kelaikan oplet.

Kata kunci : *Analisis, Pengawasan, Kelaikan oplet*

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr, Wb*

*Alhamdulillahirobbilalamin*, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, keberkahan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Dan tak lupa salawat dan salam kepada nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pengawasan pengujian Kelaikan oplet di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**” guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Delila Ansor dan Ayah Muklis yang selama ini membesarkan dan mendidik penulis dan berharap anak nya menjadi seorang Sarjana, serta seluruh keluarga tercinta, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dorongan, doa dan inspirasi, serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H, Akhmad Mujahiddin S.Ag., M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. DRS. H. Muh. Said. HM, Mag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak DR. Kamaruddin, S.Sos,M.si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Weni Puji Hastusi S.Sos M.KP Selaku Sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, dorongan, dan nasehat yang berharga.
6. Ibu Devi Deswimar S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing konsultasi proposal.
7. Bapak Muslim S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya kepada peneliti.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSUKA RIAU yang telah memberikan Ilmu kepada Penulis selama masa studi sehingga penulis memiliki dasar pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah membantu dalam proses dan urusan yang dibutuhkan.
10. Terima kasih atas dukungannya teman-teman seperjuangan, baik yang sudah wisuda maupun yang akan wisuda Robi, Okta, Alkadri, Yogi, Apdillah, Andika, Rudi.
11. Terkhususkan terima kasih telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan membantu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman ANA E, dan seluruh teman-teman Administrasi Negara yang telah sama-sama berjuang untuk gelar S.Sos penulis ucapkan terima kasih.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada seluruh guru-guru dan teman-teman semasa menimba ilmu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, terlebih kepada rekan-rekan kos dan Tim seperjuangan KKN Desa Koto Cerenti Kabupaten kuansing.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih untuk semuanya.

Semoga semua keikhlasan dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Pekanbaru, juni 2020  
Penulis

UIN SUSKA RIAU

Muhammad Robi Depala  
NIM.11375103066



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengawasan .....	12
2.1.1 Maksud Dan Tujuan Pengawasan .....	14
2.1.2 Fungsi Pengawasan .....	16
2.2 Fungsi Pemerintah .....	18
2.3 Tugas Dan Fungsi UPTD .....	20
2.4 Pengujian Kelaikan Kendaraan .....	26
2.5 Sasaran Pengujian Kelaikan .....	28
2.5.1 Mamfaat Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor .....	29
2.6 Angkutan Kota .....	30
2.7 Pengawasan Dalam Pandangan Islam .....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Defenisi konsep .....	35
2.9 Konsep operasional .....	36
2.10 Penelitian terdahulu .....	37
2.11 kerangka berfiikir .....	38

**BAB III METODE PENELITIAN .....39**

3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Sumber Data .....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.4 Informen Penelitian .....	41
3.5 Teknik Analisa .....	42

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....43**

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru .....	43
4.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru .....	45
4.3 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	47
4.4 Visi dan Misi Dinas Perhubunga Kota Pekanbaru .....	47
4.5 Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	49
4.6 Struktur Oraganisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	52

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....53**

5.1 Analisis Pengawasan Pengujian Kelaikan Oplet Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	53
5.1.1 Persyaratan teknis.....	55
5.1.2 Persyaratan laik jalan .....	61

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

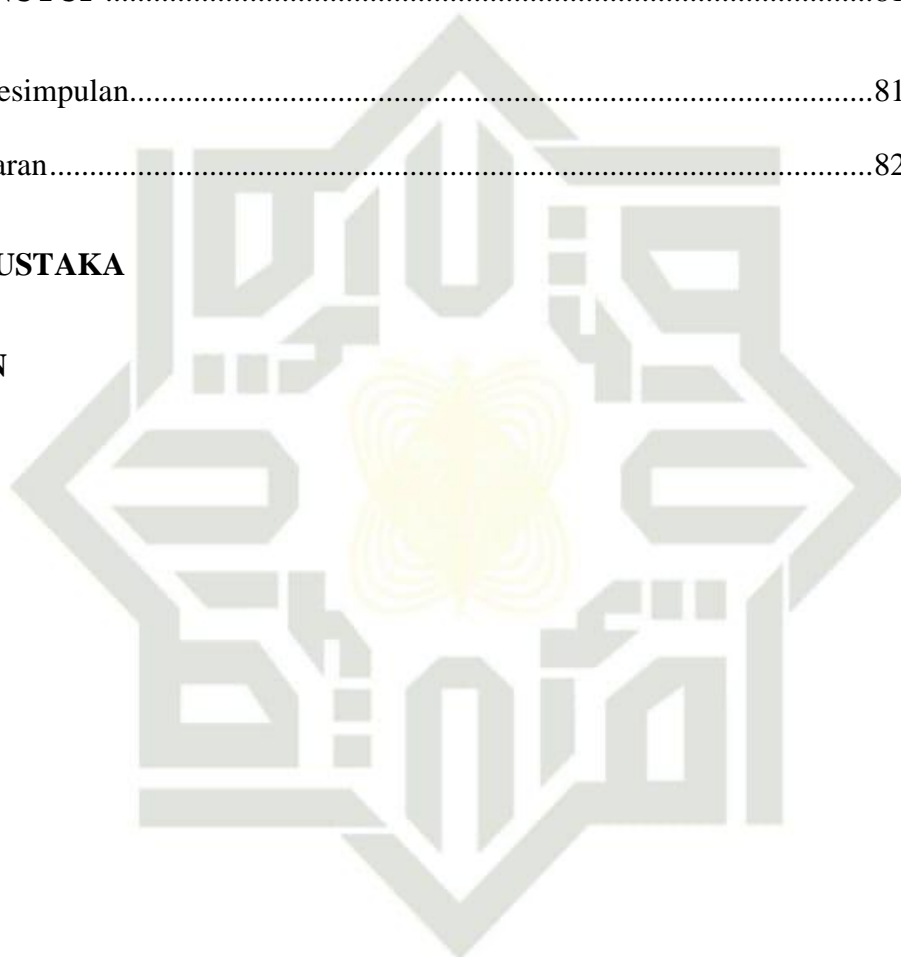
5.1.3 Pengujian berkala .....	68
5.2 Hambatan Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap pengujian kelaikan oplet .....	74
5.3 Pembahasan terhadap Hasil Penelitian.....	76

## BAB VI PENUTUP .....81

6.1 Kesimpulan.....	81
6.2 Saran.....	82

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang.

Pekanbaru adalah salah satu kota yang pertumbuhan penduduknya sangat pesat di Indonesia. Salah satu nya permasalahan kemacetan, hal ini dikarenakan jumlah permintaan kendaraan bermotor tiap tahun yang otomatis juga ikut meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan alat transportasi yang aman dan nyaman untuk melintasi berbagai wilayah. Alat transportasi yang biasanya dikenal dengan kendaraan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik manusia maupun barang. Sedangkan angkutan pribadi adalah angkutan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi, baik manusia maupun barang contohnya adalah mobil dan sepeda motor.

Semakin banyaknya penduduk di sebuah daerah, semakin banyak juga permasalahan yang akan timbulkan. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini. Pemerintah kota Pekanbaru mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan kemacetan ini. Pemerintah melakukan salah satunya penekanan jumlah kendaraan pribadi dan menambah kendaraan umum serta meremajakan kendaraan umum yang sudah tidak layak pakai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saat ini kota Pekanbaru terdapat bermacam- macam kendaraan umum yang mana bertujuan untuk mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sehingga permasalahan kemacetan itu dapat diatasi, kendaraan umum itu seperti Bus kota, Bus Transmetro, oplet dan Taksi.

Namun fenomena yang terjadi masih banyak kendaraan umum yang tidak memberikan kenyamanan kepada penumpang. Sehingga tujuan Pemerintah membuat atau meremajakan kendaraan umum tersebut tidak tercapai.

Alat transportasi yang dapat menjangkau seluruh kawasan di kota Pekanbaru dapat di akses dengan menggunakan oplet. Dengan lintas trayek dapat menjangkau seluruh kawasan di kota Pekanbaru dan dapat memasuki jalan yang tergolong sempit, oplet sangat dibutuhkan oleh Masyarakat yang menggunakan fasilitas angkutan umum. Kemampuan oplet yakni yang dapat memasuki jalur-jalur sempit di kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam transportasi di kota pekanbaru. Alat transportasi sangat mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Akibat buruknya moda transportasi yang disediakan oleh Pemerintah kota Pekanbaru, terutama oplet. Banyak oplet yang tidak memenuhi standar uji kelaikan yang mengakibatkan masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai struktur organisasi yang mengurus tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor. Kerja dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah melakukan uji kelaikan terhadap kendaraan umum secara berkala, ini bertujuan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Pekanbaru dituntut untuk mampu mewujudkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dapat cermat dan di pertanggung jawabkan. Ada 4 (empat) penguji dalam memberi legalitas standar uji kelaikan kendaraan umum penguji pemula, penguji pelaksana, penguji pelaksana lanjutan dan penyelia. Uji kelayakan dilakukan 6 (enam) bulan sekali. Untuk melihat oplet sudah melakukan uji standar dilihat dari : kartu uji, stiker disamping kanan angkutan kota dan tanda di plat oplet tersebut. Tanda lulus uji biasanya memuat nomor dan tanggal uji kendaraan, daya angkut, merek dan tipe, masa berlaku hasil uji, dan muatan sumbu terberat. Kendaraan yang laik jalan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi dituangkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 53 yaitu :

- a. Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- b. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  1. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan
  2. Pengesahan hasil uji.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan standar pelayanan minimum atau (SPM) dalam melakukan pengujian KIR, yaitu:

1. Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji melakukan pendaftaran dengan membawa syarat-syarat seperti, kendaraan wajib uji, buku uji, stnk, dan izin trayek (khusus angkutan umum). Akan menerima kwitansi pembayaran.
2. Membawa kendaraan yang akan diuji dan menyerahkan bukti pembayaran, lalu akan menerima formulir pemeriksaan kondisi teknis dan nomor urut pemeriksaan.
3. Pemilik melakukan pemeriksaan kendaraan di ruang pengujian, yang meliputi pengujian, lampu, rem, kebisingan, emisi gas buang, dan kelengkapan lainnya.
4. Pemasangan plat uji dan dinyatakan lulus uji.
5. Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik diharuskan melakukan perbaikan kendaraannya sesuai dengan rekomendasi kerusakan pada formulir pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu untuk diperiksa kembali (Pengujian Ulang).

Kemudian standar operasional prosedur atau (SOP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan uji KIR yaitu:

1. Menyediakan unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
2. Melakukan pengujian tiap enam bulan sekali. Dari peraturan yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komunikasi, dan Informasi memiliki tugas untuk melakukan uji pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan atau uji KIR, maka untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan operasi penertiban kendaraan yang mana dari hasil operasi penertiban atau razia kendaraan masih banyak dijumpai kendaraan yang tidak memperpanjang izin trayek maupun KIR (uji kelaikan jalan), serta masih banyak kendaraan yang tidak memasang papan trayek.

Pada pengujian, objek yang diperiksa adalah:

1. Sistem pengereman dan daya pengereman
2. Lampu-lampu dan daya pancar lampu utama
3. Emisi gas buang
4. Dimensi dan bobot kendaraan
5. Sistem kemudi beserta kaki-kakinya
6. Speedometer

Prosedur Pengajuan KIR Baru :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP pemilik Kendaraan
3. Foto copy BPKB
4. Memiliki Ijin Trayek untuk Angkutan Umum
5. Memiliki bukti pembayaran biaya uji
6. Memiliki sertifikat uji type/pengesahan rancangan bangun dan rekayasa kendaraan
7. Membawa kendaraan ke unit pelaksana pengujian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Prosedur Perpanjangan KIR:

1. Permohonan uji
2. STNK yang masih berlaku
3. Buku Uji, apabila hilang harus ada keterangan dari Polri
4. Bukti pembayaran biaya uji
5. Membawa kendaraan ke unit pelaksana pengujian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mengatur kelaikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya tujuan dari kebijakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang laik jalan.

Meskipun telah lama kebijakan tersebut di implementasikan di kota Pekanbaru tetapi peraturan ini belum bisa mengatur dan melayani masyarakat secara maksimal, karena selama ini para pengusaha oplet bisa dengan mudah mendapatkan surat keterangan laik jalan dari UPTD (unit pelaksanaan daerah) di kota Pekanbaru.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap kelaikan setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di Kota Pekanbaru. Karena selain memberikan kontribusi yang disetorkan ke kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan tersebut juga sangat penting yakni terciptanya tertib sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan, perbaikan infrastruktur rambu- rambu jalan dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun ekspektasi normatif tersebut dalam prakteknya tidak terlaksana.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengujian berkala kendaraan, khususnya oplet di Kota Pekanbaru sepertinya hanya wajib dilakukan terhadap mobil baru saja. Banyak sekali sopir atau pemilik oplet yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

Berdasarkan berita dari bertuahpos.com pada hari selasa, 27 april 2018 masih banyaknya oplet yang terjaring dalam operasi razia yang sering dilakukan oleh dinas perhubungan kota pekanbaru banyak yang kedapatan melakukan pelanggaran izin yang seharusnya dilengkapi seluruh oplet sebagian juga tidak memenuhi syarat laik jalan seperti spidometer yang tidak hidup , lapu sen dan lampu depan yang tidak berfungsi, kondisi ban yang tidak layak serta dinding yang telah keropos yang bisa membahayakan hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain, terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Jumlah pelanggaran lalu lintas angkutan kota Di kota pekanbaru**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggaran</b>
2017	56
2018	84

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018*

Dari tabel tersebut dapat diketahui pada tahun 2017 jumlah penggaran berjumlah 56 oplet, selanjutnya tahun 2018 berjumlah 84 oplet ini membuktikan bahwa setiap tahunnya pelanggaran angkutan kota yang terjadi di Kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru terus meningkat dikarenakan kelalaian dan tidak adanya kesadaran dan pemilik oplet dalam mengurus uji kelaikan. Ini akan berdampak buruk kepada transportasi Kota Pekanbaru yang menyebabkan kemacetan serta menimbulkan rendahnya minat penumpang akan transportasi umum dikarenakan tidak terjaminnya keselamatan dan kenyamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengujian kelaikan oplet merupakan bagian dari keselamatan (perlindungan) baik terhadap penumpang maupun bagi pelaku usaha oplet dan dan di lihat dari oplet yang melakukan uji pengujian kelaikan di dinas perhubunga kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel dibawah:

**Tabel 1.2 :**  
**Jumlah Oplet Yang Melaksanaan Uji Berkala Aktif Dan Non Aktif Pada Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah oplet Yang Melakukan Pengujian	Jumlah oplet Yang Tidak Melakukan Pengujian	Jumlah Angkutan Kota Wajib Uji
2016	783	683	1466
2017	854	820	1674
2018	783	1125	1908

Sumber: UPTD Uji kelayakan kendaraan bermotor Dinas perhubungan kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah angkutan kota pada tahun 2016 yang melakukan pengujian kelaikan aktif sebanyak 783 oplet , selanjutnya yang tidak melakukan pengujian 683 tidak aktif yang mana seharusnya jumlah kendaraan yang wajib uji sebanyak 1466, selanjutnya pada tahun 2017 yang melakukan pengujian aktif 854 oplet dan tidak melakukan pengujian sebanyak 820 oplet, yang seharusnya wajib uji berjumlah 1674 oplet, selanjutnya pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2018 sebanyak 783 oplet yang melakukan pengujian laik aktif, angkutan yang tidak melakukan uji sebanyak 1125 oplet, yang seharusnya angkutan yang wajib uji berjumlah 1908.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Pengujian kelaikan Oplet di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”**

### 1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengawasan Pengujian kelaikan oplet di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ?
2. Apa hambatan dalam Pengawasan Pengujian kelaikan oplet di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pengawasan Pengujian kelaikan oplet di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam Pengawasan Pengujian kelaikan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis  
Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang di laksanakan sehingga memberikan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mendalam tentang Pengawasan dalam Pengujian kelaikan oplet. Sebagai bahan pengembangan disiplin dalam ilmu administrasi.

## 2. Secara Praktis

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan supaya nantinya dapat dijadikan sebuah penilaian untuk lebih meningkatkan dalam Pengawasan pengujian kelaikan oplet.
2. Menambah informasi keilmuan untuk mengembangkan kualitas kreatifitas bagi penulis dalam mengembangkan ilmu tentang Pengawasan Pengujian kelaikan oplet di Pekanbaru.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri enam bab dan sub-sub bab, meliputi sebagai berikut :

### BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas masalah yang berhubungan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Serta Sitematika Penulisan.

### BAB II. Telaah Pustaka

Bab ini berisi pengertian pengawasan, fungsi pemerintah, tugas fungsi UPTD, pengujian kelaikan kendaraan, sasaran pengujian kelaikan kendaraan bermotor, pengawasan dalam pandangan islam, definisi konsep, konsep operasional, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data teknik dan pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisis data.

### **BAB IV. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bab ini berisi sejarah Kota Pekanbaru, wilayah geografis Kota Pekanbaru, sejarah singkat dinas perhubungan Kota Pekanbaru, visi dan misi dinas perhubungan Kota Pekanbaru, tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan Kota Pekanbaru, struktur organisasi dinas perhubungan Kota Pekanbaru.

### **BAB V. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan analisis pengawasan pengujian kelaikan oplet dinas perhubungan Kota Pekanbaru, hambatan dalam pengawasan dinas perhubungan terhadap pengujian kelaikan oplet, pembahasan terhadap hasil penelitian.

### **BAB VI. Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pengawasan

Menurut George R. Terry (2009) pengawasan merupakan seluruh kegiatan atau sebagian besar kegiatan perusahaan yang diperlukan sebagai unit dasar. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap suatu kegiatan atau fungsi tertentu. Tujuannya ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja di antara unit – unit secara terpadu. Pengawasan dapat menjadi alat untuk . (a) mengukur keseluruhan usaha pra top-manajer (b) mengendalikan seluruh perencanaan dan (c) mengendalikan unit – unit yang semi otonom karena terjadi desentralisasi melebar. Pengawasan umumnya dilakukan oleh kegiatan – kegiatan keuangan.

Menurut Inu Kencana (2006) pengawasan merupakan ketetapan dalam apapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan. Sondang P Siagian(2004) selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam tekhnis yaitu : pertama pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan oleh bawahannya. Dan yang kedua pengawan tidak langsung (*inderect control*) pengawan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Menurut Irawan (2000) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

1. Pengawasan proventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan kegiatan selanjutnya.

2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan kegiatan membandingkan apa yang terjadi dan apa yang harusnya terjadi.

Menurut Silalahi (2002) langkah langkah dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Tetapkan standar

Standar kriteria hasil yang diinginkan dalam melaksanakan kegiatan, menetapkan suatu standar akan memberikan suatu nilai atau petunjuk yang menjadi ukuran sehingga hasil – hasil yang nyata dapat di bandingkan.

2. Monitor dan ukur kerja

Agar pelaksanaan pengukuran kerja dapat berjalan dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan. Untuk mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara atau angket, pengamatan atas laporan baik lisan maupun laporan secara tertulis.

3. Bandingkan hasil aktual dengan standar

Tahap ketiga dalam proses pengawasan ini adalah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti digunakan sebagai ukuran yang diperbandingkan.

4. Ambil tindakan perbaikan

Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil tindakan perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang di inginkan.

### 2.1.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain adalah tujuan dari pengawasan. Sebab kegiatan pada dasar nyaselalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh kanera itu pengawasan mutlak diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994). Maksud dari pengawasan adalah :

1. Untuk mengetahui segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.
2. Untuk mengetahui sesuatu berjalan dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah di tetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat di adakan perubahan- perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegitan- kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efesien dan apakah dapat di adakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga menjadi efesiensi yang lebih benar.

Dan tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui lancar apa tidak nya pekerjaan
2. Memperbaiki kesalah-kesalahan yang di perbuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali.
3. Mengetahui apakah dana yang di rencanakan terarah kepada apa yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah di rencanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah di tentukan dalam plening atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah di tetapkan Dalam planing yaitu standard.

Dari pendapat ahli di atas dapat di simpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja,hasil kerja,dan segala sesuatu apakah sesuai dengan yang di rencanakan atau tidak,serta mngukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu untuk di perbaiki ke arah yang lebih baik.

Menurut Maman Ukas (2004) maksud dan tujuan pengawasan sebagai berikut :

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan di laksanakan.
2. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan - rintangan yang akan mengganggu produktifitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktifitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang di harapkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situmorang dan Juhir (2001) mengemukakan secara langsung tujuan pengawasan adalah:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan pemerintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang di hasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan informasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta intruksi-intruksi yang telah di perbuat.
2. Untuk mengetahui ada tidak nya kesulitan-kesulitan,kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efesiensi dan efektifitas kerja.

**2.1.2 Fungsi Pengawasan**

Fungsi Pengawasan Menurut Ernie dan Saefulah (2005), fungsi pengawasan adalah:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004) fungsi pengawasan adalah mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerja :

1. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
2. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan dan melakukan tindakan koreksi bila diperlukan. untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan ang ditetapkan.



## 2.2 Fungsi Pemerintah

Osborne dan Gaebler (dalam Rasyid, 2000) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Lebih lanjut Rasyid menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi, yaitu:

### 1. Fungsi Primer

Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, fungsi ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya. Yang termasuk fungsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Pelayanan (Serving)

Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Fungsi pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang.

### 2. Fungsi Pengaturan ( *Reguling* )

Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.

### 2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka fungsi sekundernya akan berkurang.

Yang termasuk dalam fungsi sekunder adalah:

#### 1. Fungsi Pembangunan ( *development* )

Fungsi ini dikategorikan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila sikon masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Jadi, pemerintah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi dan misi organisasi.

## 2.3 Tugas dan Fungsi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pengujian kelaikan

### Kendaraan

1. Kepala UPTD
  1. Menyiapkan Rencana Kerja.
  2. Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan.
  3. Menyusun Laporan.
  4. Pengkoordinasian dengan SKPB terkait.
  5. Pelaksanaan Evaluasi Tugas.
  6. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.

7. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
9. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
10. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
12. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas.
13. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
14. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. KASUBBAG Tata Usaha**

1. Pelayanan administratif.
2. Penyusunan rencana kerja.
3. Mewakili kepala UPTD.
4. Pelaksanaan urusan dalam kantor UPTD.
5. Penyusunan perbekalan.
6. Pelaksanaan K3.
7. Verifikasi penerimaan.
8. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

**3. Penguji Kendaraan Bermotor**

1. Menguji rem kendaraan bermotor (brake) gaya rem utama dan rem paker, kepekatan asap gas buang dan emisi gas buang (CO- HC), efisiensi rem utama kendaraan bermotor, rem parkir arah maju dan mundur kendaraan bermotor dan menguji posisi roda depan (wheel alignment).
2. Menganalisa data hasil pengujian.
3. Menghitung dan menetapkan antara lain jumlah berat yang diijinkan, jumlah daya angkut orang dan barang, jumlah muatan sumbu terberat (MST).
4. Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui dan masa berlaku uji berkala berikutnya.
5. Mengisi dan menandatangani buku uji.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menghitung dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan.
7. Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan beban alat uji (inersia alat uji) dengan kendaraan bermotor.
8. Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati, mencatat dan melakukan perhitungan hasil.
9. Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati grafik performansi kendaraan bermotor berdasarkan data hasil uji.
10. Menghitung power weight ratio.
11. Mengkonfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang disampaikan.
12. Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui.
13. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kalaikan jalan.
14. Melakukan validasi untuk pengesahan gambar teknis tentang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
15. Melakukan kalibrasi peralatan pengujian antara lain diesel smoke tester, brake tester, head light tester, chasis dynamo meter, flat track tire, road wheel tester, suspension tester, dynamic wheel alignment tester dan static wheel alignment tester.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Penguji lanjutan.**

1. Menerima pendaftaran persyaratan uji.
2. Menginventarisir pendaftaran.
3. Menulis kwitansi / bukti pembayaran.
4. Menyerahkan buku uji dan plat uji kendaraan yang lulus uji.
5. Menyetor uang harian.
6. Membuat laporan harian.

**5. Penguji Pelaksana**

1. Memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji pertama
2. Memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan bermotor untuk uji regular
3. Memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor sesuai.
4. Memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas kendaraan bermotor tidak sesuai.
5. Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor konfirmasi hasil verifikasi/validasi.
6. Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor penetapan pelaksanaan penguji.
7. Mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan tiap unit kendaraan bermotor.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengisi dan mengesahkan tanda samping kendaraan bermotor.
  9. Memasang dan mengesahkan plat uji.
  10. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala kendaraan bermotor.
  11. Menetyapkan pelaksanaan uji berkala
6. Penguji Pelaksana Pemula.
1. Memeriksa identitas kendaraan bermotor.
  2. Membawa dan mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian dilakukan.
  3. Melakukan verifikasi / validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor.
  4. menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan.
  5. Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar.
  6. Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor.
  7. Mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan bermotor.
  8. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
  9. Menimbang kendaraan bermotor.
  10. Melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor : a.



Melaksanakan administrasi di bidang PKB. b. Memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor. c. Membuat laporan hasil penguji/pemeriksaan kendaraan bermotor.

11. Entry data hasil pelaksanaan pengujian ke dalam data base.

## 2.4 Pengujian Kelaikan kendaraan

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pengujian kelayakan merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 53 yaitu:

1. Uji berkala yaitu sebagaimana dimaksud didalam pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
2. Pengujian berkala yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor
  - b. Pengesahan hasil uji.
3. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Unit pelaksanaan pengujian pemerintah kabupaten atau kota.
  - b. Unit pelaksanaan agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah atau.



- c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari pemerintah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini mengatur Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan raya tujuan dari kebijakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang laik jalan.

Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan bersifat pelayanan umum dan lebih diutamakan pada pertimbangan menyangkut keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan di jalan sampai pada tujuannya dan kesejahteraan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan yang digunakan di jalan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan materi.

Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional. Pada kenyataannya, kegiatan pengaturan dan pembinaan tersebut menuntut keterlibatan serta dukungan berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat yang mempunyai kaitan tugas dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pemerintah tersebut terkoordinasi secara utuh, tertib, dan teratur antara satu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan lainnya, tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

Pemilik wajib untuk daftar kendaraannya dalam rangka mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

## 2.5 Sasaran Pengujian kelaikan Kendaraan bermotor

Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta teknisnya baik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas layak jalan yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 54 ayat 3 meliputi :

- a. Emisi gas buang kendaraan bermotor
- b. Tingkat kebisingan
- c. Kemampuan rem utama
- d. Kemampuan rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Kemampuan pancara dan arah sinar lampu utama

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g. Akurasi alat petunjuk kecepatan dan

h. Kedalaman alur ban.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan bermotor dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelayakan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen secara teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.

#### 2.5.1 Manfaat Pengujian kelaikan Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009, manfaat pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kendaraan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan dan kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha tentang daya angkut yang diizinkan, muatan sumbu teberat serta kelas jalan terendah yang dapat dilalui sehingga diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan di jembatan.
- c. Memberi saran-saran perbaikan kepada pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menginformasikan kelemahan-kelemahan terhadap produksi tertentu untuk langkah penyempurnaan khususnya bagi produsen atau agen tunggal pemegang merek
- e. Menyajikan data kuantitatif tentang potensi angkutan, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang dalam hubungan dengan pembinaan angkutan secara umum.

## 2.6 Angkutan Kota

Angkutan kota, menurut Setijowarno dan Frazila (2001), adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan menggunakan mobil bis umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Dapat juga angkutan kota berupa angkutan massal atau mass rapid transit yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan.

Mobil penumpang umum (MPU) adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Sedangkan Mobil bis umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi (Kementrian Perhubungan No. 68 Tahun 1993).





Pentingnya sarana transportasi dalam perkembangan dunia bersifat multidimensi. Sebagai contoh, salah satu fungsi transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat barang dengan pelanggannya (Khisty, 2005:1). Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sehingga transportasi bukan merupakan tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan guna menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu. Transportasi yang baik menjamin pergerakan manusia dan barang yang aman, cepat, nyaman, mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan (Khisty, 2005).

Pada saat ini sebagian besar pemakai angkutan umum masih mengalami beberapa aspek negatif sistem angkutan umum jalan raya, (Tamin, 2000) yaitu:

1. Tidak adanya jadwal yang tetap.
2. Pola rute yang memaksa terjadinya transfer.
3. Kelebihan penumpang pada jam sibuk.
4. Cara mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan.
5. Kondisi eksternal dan internal yang buruk.

Kecenderungan perjalanan orang dengan angkutan pribadi di daerah perkotaan akan terus meningkat bila kondisi sistem transportasi tidak diperbaiki secara lebih mendasar. Peningkatan kecenderungan perjalanan dengan angkutan pribadi adalah dampak fenomena pertumbuhan daerah perkotaan yang disebabkan oleh:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi kurang terlayani oleh angkutan umum yang memadai.
2. Meningkatnya daya beli dan tingkat privasi yang tidak bisa dilayani oleh angkutan umum.
3. Meningkatnya harga tanah di pusat kota mengakibatkan tersebar lokasi permukiman jauh dari pusat kota atau bahkan sampai ke luar kota yang tidak tercakup oleh jaringan layanan angkutan umum.
4. Dibukanya jalan baru semakin merangsang penggunaan angkutan pribadi karena biasanya di jalan baru tersebut belum terdapat jaringan layanan angkutan umum.
5. Tidak tersedianya angkutan lingkungan atau angkutan pengumpan yang menjembatani perjalanan sampai ke jalur utama layanan angkutan umum.
6. Kurang terjaminnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan tepat waktu, kebutuhan akan lama perjalanan yang diderita dalam pelayanan angkutan umum. (Tamin,2000)

### 2.7 Pengawasan Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan islam pengawsan di lakukan untuk malurusakn yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawsan dalam islam terbagi menjadi dua hal:

Pengawaan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada ALLAH SWT. Seseorang yang yakin bahwa allah itu pasti mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti yang

terdapat dalam AL-quran Surat AL-Mujadilah ayat 7 sebagai berikut:

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut di luar diri sendiri. Sistem ini dapat terlihat dalam mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah di delegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, harus sudah ada control didalamnya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang di acuhkan atau





pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang di acuhkan atau yang dianggap enteng. Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari system pengawasan yang baik.

Selain menyaksikan segala sesuatu, Allah juga mengetahui semua pembicaraan rahasia. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, karena penglihatan Allah menembus batas-batas ruang dan waktu' oleh sebab itu, bagi Allah, tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, karena Allah ada, hadir dan terlibat dalam keseharian hamba-hamba-Nya. Dan tidak ada lima orang yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan dialah yang keenamnya, karena Allah dekat dan terlibat dalam aktivitas manusia. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan dia, pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada, meskipun manusia sering tidak merasakan kehadiran Allah bersama mereka, karena kalbunya yang terhibab.

Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian hukuman dan imbalan. Jika seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, maka karyawan tersebut sebaiknya diberikan imbalan. Bentuk imbalan tidak mesti bersifat material, akan tetapi juga bisa dalam bentuk pujian dan penghargaan, serta promosi untuk menaikkan jabatan. Sebaliknya, jika karyawan melakukan pekerjaan dengan berbagai kesalahan, hingga merugikan perusahaan, maka sebaiknya karyawan tersebut diberikan hukuman. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa teguran, peringatan, skors, bahkan pemecatan. Selain itu, bentuk pengawasan yang baik dapat berjalan jika sang manajer berusaha memberikan contoh yang baik kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bawahannya, sehingga karyawan merasa termotifasi dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin.

## 2.8 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, pengawasan pengujian kelaikan oplet di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana dituliskan batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu.

1. Harahap (2001) pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semuanya terjadi dengan apa yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang juga di anut dan jukka dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari. perjalanan.
2. Pengujian kelayakan memiliki arti melakukan pengecekan kendaraan, kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis, akan tetapi lebih dikongkritkan dalam melakukan penelitian, berikut ini adalah konsep operasional dalam penelitian ini, yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pengawasan Pengujian Kelaikan Angkutan oplet di dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1. Persyaratan Laik teknis	1. Susunan
		2. Perlengkapan
		3. Pemuatan
		4. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
	2. Persyaratan Laik jalan	1. Emisi gas buang
		2. Kebisingan suara
		3. Efisiensi sistem rem utama
		4. Efisiensi sistem rem parkir
		5. Suara klakson
		6. Daya pancar dan arah lampu utama
		7. Akurasi alat penunjuk kecepatan
		8. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
		9. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
	3. Pengujian Berkala	1. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor
		2. Pengesahan hasil uji

Sumber : Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



## 2.10 PENELITIAN TERDAHULU

NO	JUDUL	PENELITIAN	HASIL
1	Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Menertipkan Terminal Ilegal Di Kota Pekanbaru	Resky Amalia Yusera (2017)	Dalam menjalankan tugas pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pemberian sanksi yang dilakukan petugas berjalan sesuai aturan
2	Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum	Fitri fadillah sari (2014)	Hasil pengamatan dan wawancara yang dikatakan banyak pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kemacetan
3	Analisis peranan dinas perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan travel ilegal di kota pekanbaru	Junaidi (2014)	Dapat dikatakan bahwa peranan dinas perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan travel ilegal dikota pekanbaru dikatakan baik

Sumber: Data Diolah 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

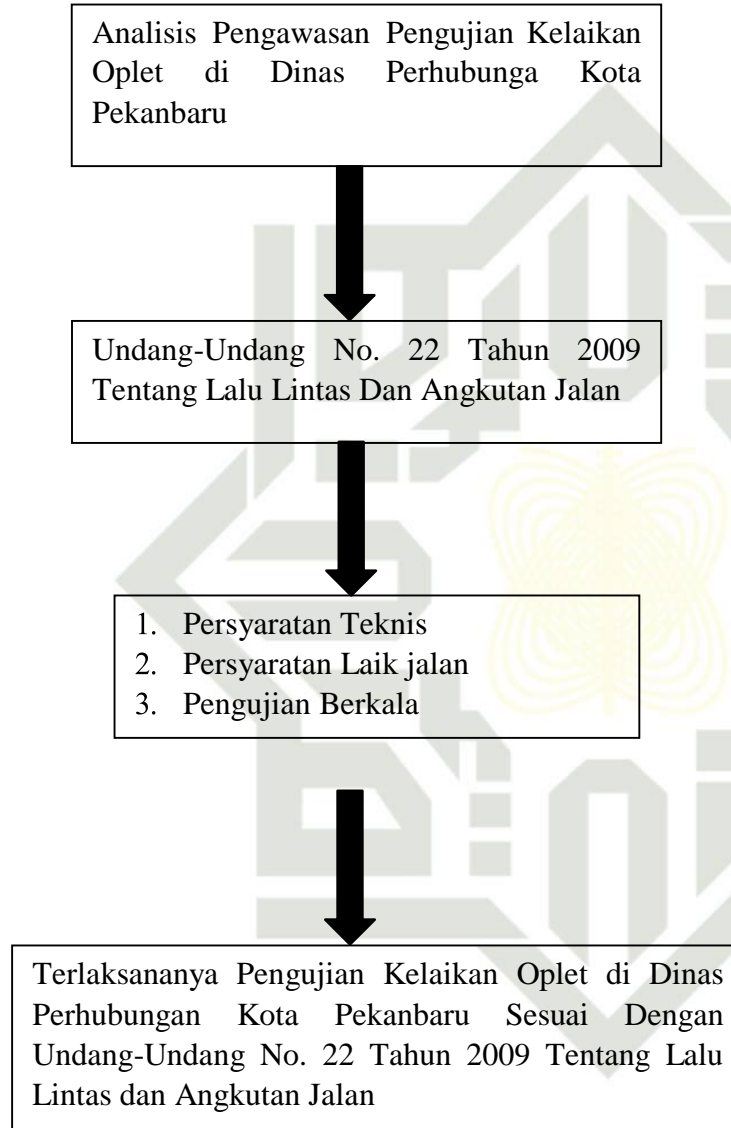
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.11 Kerangka berfikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka fikiran dari penelitian ini sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengacu pada sumber data yang digunakan, maka pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif (kualitatif).

Sugiyono (Harbani Pasalong, 2013) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif (penggambaran) adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi (2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisi dan mengintrepretasi.

#### 3.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder karena untuk memperoleh informasi langsung dari informen seperti Kepala Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.

##### 1. Narasumber (Informan)

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait pemasalahan penelitian.



## 2. Dokumen dan arsip

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait dengan Analisis Pengawasan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Data primer diperoleh dari;

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### 2. Data Sekunder,

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa:

1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2. UPTD Pengujian Kelaikan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

#### 1. Observasi

Menurut Kartono (Imam Gunawan, 2013) pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Haris Herdiansyah, 2013)

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sebagai bahan bukti dari hasil wawancara dan dokumentasi foto.

### 3.4 Informen Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Adapun informen pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Table 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Kepala UPTD pengujian kendaraan Dinas perhubungan Kota Pekanbaru	1
2	Pegawai UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	3
3	supir	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa informen penelitian yang peneliti ambil adalah sebanyak 6 orang, adapapun yang peneliti jadikan sebagai informen penelitian telah di anggap mampu dan mengetahui segala informasi dalam permasalahan yang diteliti.

### 3.5 Teknik Analisa

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dianalisis berdasarkan metode teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli administrasi Negara, serta berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang.

Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rabab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### 4.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

##### 1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ Km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya terdib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

#### 2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

#### 3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampen dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

#### 4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **4.3 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Kantor dinas perhubungan kota pekanbaru berdiri pada tanggal 28 oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan menteri perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya kota pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan perhubungan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan ), kemudian adanya UU No.22 tahun 1999 dan PP No.25 tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Penyempurnaan UU No.22 tahun 2007, PP No.41 tahun 2007, Perda No.8 tahun 2008 dan Perwako No.8 tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru.

Dan pada pada tahun 2016 dinas perhubungan pisah dengan Komunikasi dan Informasi dan mengganti nama meenjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .

Sebagai tindak lanjut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dimana penyelenggaraan otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan, untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

#### **4.4 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau “

Visi ini mempunyai makna yaitu : Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas-instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota pekanbaru.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka Visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yang di emban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana system jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

#### 4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan,

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas adalah:

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf dinas;
3. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan.
4. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan.
5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas tersebut diatas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
4. Pembinaan dan pelaporan;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.

Adapun peran serta rencana strategis dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah agar pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sektor Perhubungan dapat berlangsung secara kesinambungan dan komprehensif maka perlu disusun suatu Rencana Strategi (Renstra) dengan adanya Renstra diharapkan tersedia pedoman serta arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Dinas yang dalam hal ini dituangkan dalam program lima tahunan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengambil kebijakan kebijakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik di bidang Perhubungan maupun Kesekretariatan;
- b. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Perhubungan;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan keterpaduan pemberian beberapa perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu Badan Pelayanan Terpadu;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

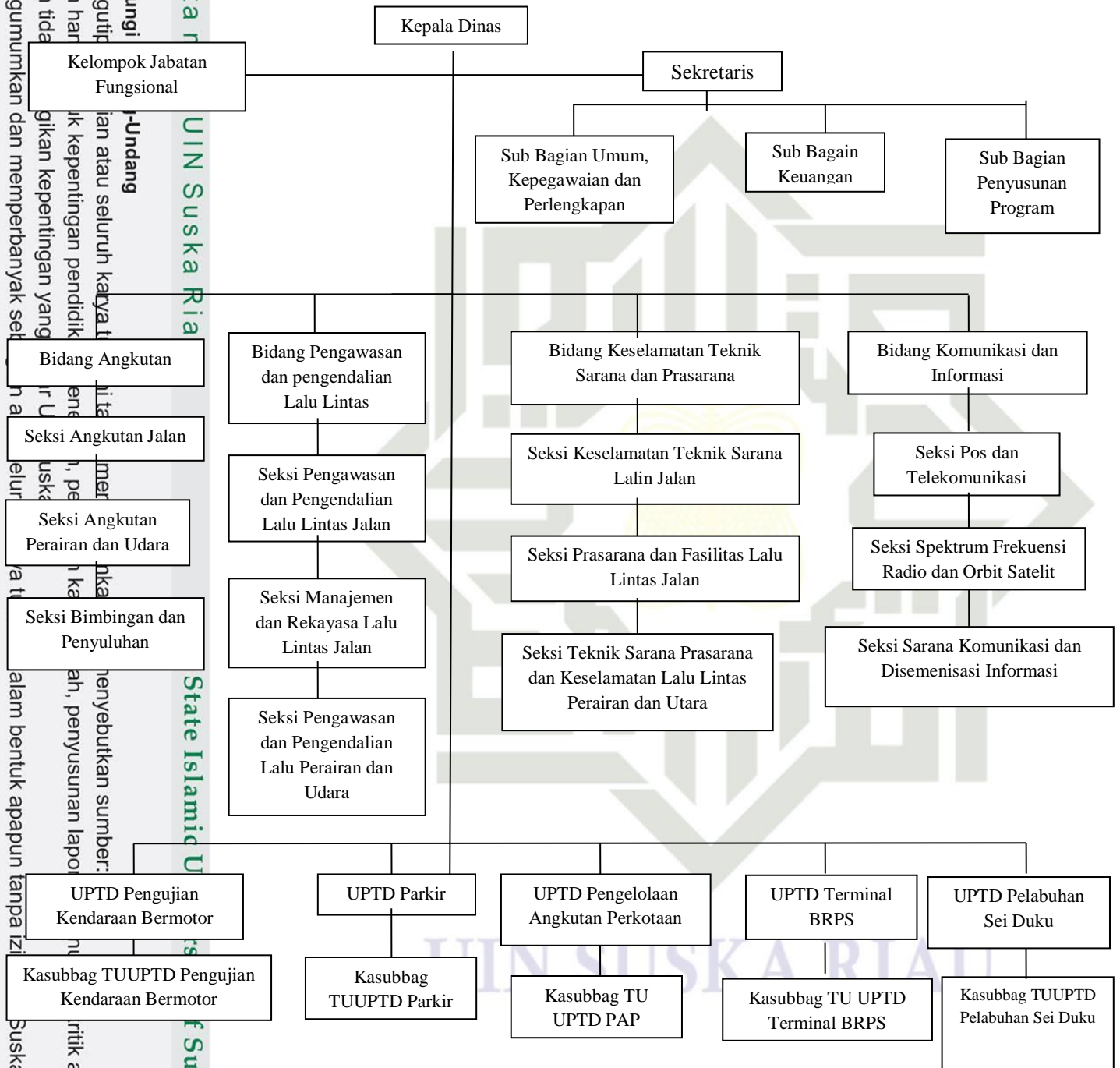
#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarananya;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertibberlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan;
- h. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota;
- i. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.



#### 4.6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

##### Kota Pekanbaru





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan dari bab sebelumnya, sebagai hasil dari pembahasan dan analisis penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas perhubungan meloloskan uji kelaikan dengan standar operasional yang di tetapkan untuk menentukan persyaratan teknis, persyaratan laik jalan dan pengujian berkala hanya melihat dari segi ketebalan ban, lampu, kaca dan mesin dari pemenuhan persyaratan operasional tersebut belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Dinas perhubungan beralasan tentang masih diloloskannya uji kelaikan dalam menentukan persyaratan teknis, persyaratan laik jalan dan pengujian berkala karena kalau hanya mengikuti prosedur yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang maka masyarakat akan kebingungan ada yang
3. Hambatan dalam melakukan pengujian kelaikan oplet yaitu seperti kurangnya fasilitas yang memadai dalam melakukan pengujian, kurangnya memadainya alat pengujian yang mana Alat uji yang bersifat mekanik dapat mengalami kerusakan kapan saja dan rendahnya kesadaran para pemilik oplet dalam melakukan pengujian.



## 6.2 Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini oplet harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar proses pengujian kelaikan oplet dapat berjalan dengan baik sehingga oplet di kawasan kota Pekanbaru dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penumpangnya atau bagi masyarakat adanya sikap yang tegas, professional dan transparan dalam melakukan proses pengujian oplet ini, sehingga hasil oplet yang melakukan pengujian oplet memang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang.
2. Perlu adanya sosialisasi kebijakan yang tepat pada sasaran dan himbauan dari berbagai media, baik media cetak dan elektronik agar kebijakan yang akan dilaksanakan akan dipahami oleh wajib uji sehingga akan timbul kesadaran akan pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini oplet secara berkala demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna oplet.
3. Perlunya diupayakannya anggaran pemeliharaan dan perawatan alat-alat uji yang rusak guna dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengujian kelaikan oplet di dinas perhubungan kota Pekanbaru.
4. Agar melakukan pengawasan lebih optimal kepada pemilik maupun supir oplet tentang pentingnya pengujian kelaikan oplet nya serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada oplet yang tidak melakukan pengujian atau tidak laik jalan dan masih beroperasi di jalan.





## DAFTAR PUSTAKA

Sufat AL-Mujadilah.

C. Motin Khisty dan B. Kent Lall. 2005. *Dasar Rekayasa Transportasi*. Jilid 1  
Jakarta: PT. Erlangga.

Harahap. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta, Quantum.

Irawan. 2000. *Pengawasan Perda Dan Kepala Daerah*. Jakarta, Bina Aksara.

M. Situmorang, V. dan Juhi, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Maman Ukas. 2004, *Manajemen Konsep, Prinsip Dan Aplikasi*, Bandung,  
Penerbit Agnini.

Narbuko, Cholid, 2010, *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.

Pasalon, Harbani, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor.

Rasyid, 2000, *Makna Pemerintah, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*,  
Jakarta : PT. Yarsif Watampone.

Sejarwamono, D, dan Frazila, RB (2001). *Pengantar Sistem Transportasi*. Edisi  
Pertama, Semarang.

Sigugan, Sondang. 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Penerbit Bumi  
Aksara, Jakarta.

Silalahi. 2002. *Studi Administrasi, Konsep, Teori, Dan Dimensi*, Sinar Baru  
Algesindo, Bandung.

Sue, T Ernien dan Saefulloh K. 2005, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama  
Jakarta. Prenada Media.



Tamin, Ofyar Z, 2000, *Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi*, ITB Bandung.

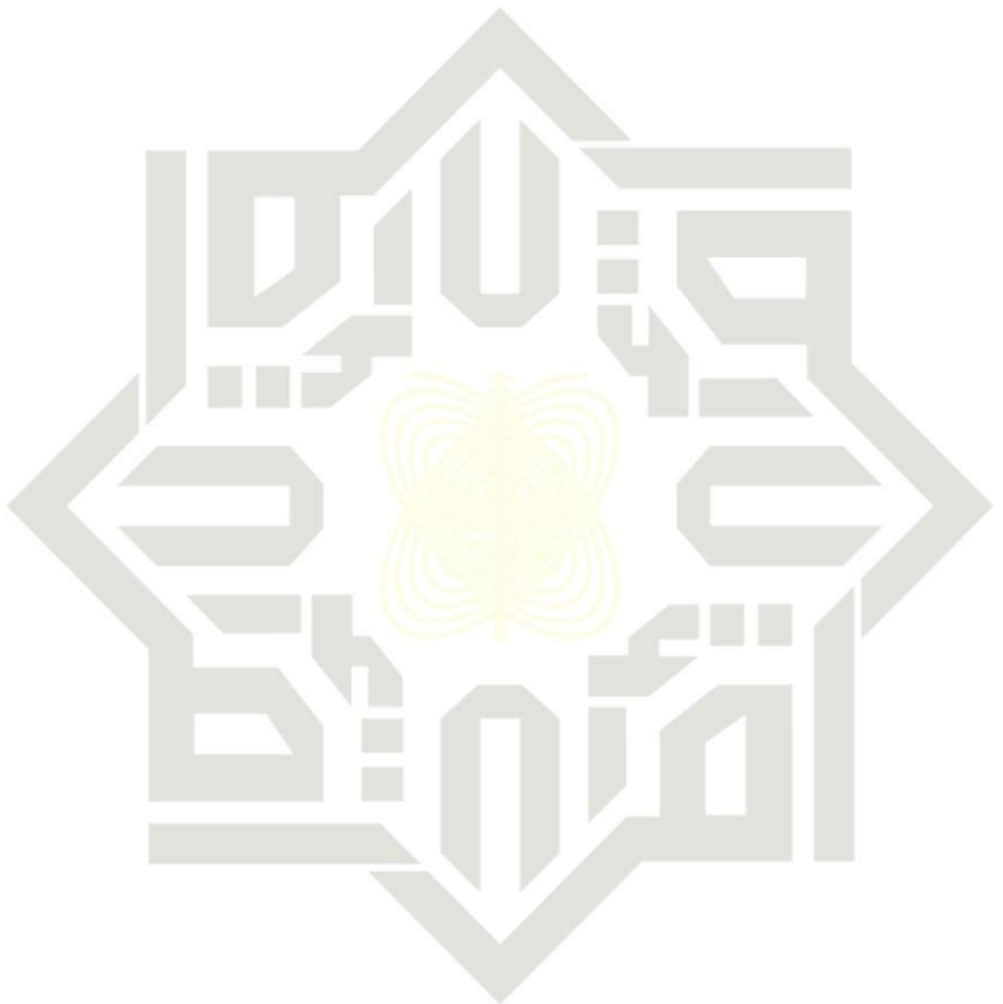
Terry, George R. 2009. *Teori manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6236/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 09 Oktober 2018 M  
28 Muharram 1440 H

Kepada  
Yth. **Devi Deswimar, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Muhamad Robi Depala  
NIM : 11375103066  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XI (Sebelas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengawasan Pengujian Angkutan Kota Studi Kasus Oplet Dinas Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5381/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 04 Oktober 2017 M  
13 Muharram 1439 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhamad Robi Depala  
NIM. : 11375103066  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Pelaksanaan Uji KIR Angkutan Umum Dinas Perhubungan  
Pemerintah Kota Pekanbaru "** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec  
NIP. 19711119 200501 1 004

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Muhammad Nasri, SH, m.Si Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Wawancara Dengan Staff UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Teddy Bagian Pengujian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Proses Pengujian Oplet Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Supir Oplet di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



UPTD pengujian kendaraan bermotor dinas perhu



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PERHUBUNGAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Jalan Subrantas KM. 10,5 No. Telp. - Kelurahan Delima Kecamatan Tampan



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 521.23/DISHUBKOM-PKB/IX/19/409

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor : 071/ BKBP-REKOM/2018/3988 dan surat rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan terpadu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16357 tanggal 11 Desember 2018 Perihal pelaksanaan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

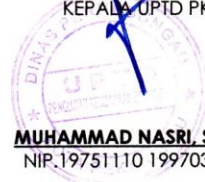
Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menerangkan bahwa :

Nama	:	<b>MUHAMMAD ROBI DEPALA</b>
NIM	:	11375103066
Fakultas	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	:	S1
Judul Penelitian	:	<b>ANALISA PELAKSANAAN UJI KIR ANGKUTAN UMUM</b>
Lokasi Penelitian	:	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Benar telah melakukan penelitian riset untuk pengumpulan bahan data skripsi di lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhitung 11 Desember 2018.

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 September 2019  
KEPALA UPTD PKB



**MUHAMMAD NASRI, SH, M.SI**  
NIP.19751110 199703 1 007





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP - FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



232018

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2018/3829

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/16357 tanggal 11 Desember 2018, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD ROBI DEPALA
2. NIM : 11375103066
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Judul Penelitian : ANALISIS PELAKSANAAN UJI KIR ANGKUTAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Desember 2018

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
SEKRETARIS



Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16357  
T E N T A N G



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/7070/2018 Tanggal 27 November 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

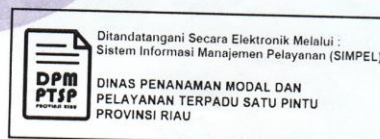
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : Muhamad Robi Depala   |
| 2. NIM / KTP         | : 11375103066   |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>ANALISIS PELAKSANAAN UJI KIR ANGKUTAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : <b>DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU</b>  |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Desember 2018



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru